

Menilai Kinerja Laporan Keuangan Desa dengan Analisis Rasio Keuangan (Studi Literatur)

Hariany Idris^{1*}

¹Jurusan Ilmu Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

This paper aims to explore techniques for measuring village government financial performance. One of the most commonly used is the analysis using financial ratios. These financial ratios use financial statement data to then fill in the slots in the predetermined formulas. The ratio analysis includes, among others, Liquidity Ratio, Solvency Ratio, Profitability Ratio, and Activity Ratio. Analysis of the village government's financial performance is used to compare the results of one period with the previous period to find out how the financial management is. The analysis of the village government's financial performance is the most important part of its financial management in assessing the government's performance to manage village finances.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknik-teknik pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa. Salah satu yang paling umum digunakan adalah analisis menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut menggunakan data laporan keuangan untuk selanjutnya mengisi slot pada rumus-rumus yang telah ditentukan. Analisis rasio tersebut antara lain, Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Aktivitas. Analisis kinerja keuangan pemerintah desa digunakan untuk membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangannya. Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa merupakan bagian terpenting untuk pengelolaan keuangannya dalam menilai kinerja pemerintahan untuk mengelolah keuangan Desa.

Keywords:

Financial Performance Ratio; Financial Statements; Village Government

* Corresponding Author at Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Makassar, Jl. Pendidikan No. 1 Gunungsari, Makassar 90231 South Sulawesi, Indonesia.
E-mail address: hariany.idris@unm.ac.id (author#1)

1. Pendahuluan

Otonomi daerah dapat mendorong masyarakat agar dapat mengatur dan mengurus daerahnya, maka pemerintah daerah harus memiliki tingkat kemandirian keuangan

daerah yang lebih besar. Dalam tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar yang dimaksud yaitu daerah tidak akan lagi bergantung pada bantuan dari pemerintahan pusat dan provinsi melalui dana pertimbangan. Dana pertimbangan masih sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah (Nordawan, 20012:5).

Sistem pemerintahan Indonesia yang paling kecil yaitu pemerintahan desa. Desa yang dipimpin oleh kepala desa serta memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan memiliki peran dalam mengelola pemerintahannya. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada Pemerintah desa dalam menerapkan prinsip yang mengelola pemerintahannya, dimana semua kegiatan kegiatannya yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan keputusan yang berlaku. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Pemerintahan desa meliputi pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Dalam pemerintahan desa mencakup kepala desa dan perangkat desa, sedangkan dalam perangkat desa mencakup sekretaris desa dan pelaksana kewilayahan (Wiratna, 2015:120).

Tata pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui pertanggungjawaban dan penyusunan APBDes. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa pembangunan Desa diharapkan memiliki kualitas yang baik serta positif bagi masyarakat Desa. Desa memiliki wewenang dalam mengelola keuangannya, dan juga memiliki kewajiban untuk menyusun APBDes dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat maka Desa harus menyusun APBDes (Sobaruddin, 2019).

Laporan keuangan Desa merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah Desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan akuntansi keuangan desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk akuntabilitas dalam mewujudkan kinerja pemerintah, dimana pengukuran kinerja dapat membantu dalam mengelola dan memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja sangatlah penting bagi pemerintah. Pengukur kinerja laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk mengetahui baik buruk laporan keuangan. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk mengetahui secara efektif laporan keuangan, dimana dapat diketahui perkembangan laporan keuangan dari ke masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009:121).

Menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola laporan keuangan daerah dengan melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kinerja laporan keuangan pemerintah Desa akan membantu kepala desa dalam mengambil keputusan untuk menggunakan dana APBDes secara baik yang telah disediakan

pemerintah pusat. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu mengetahui informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan posisi keuangan suatu pemerintah daerah (Wiratna, 2015:106).

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangannya. Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa merupakan bagian terpenting untuk pengelolaan keuangannya dalam menilai kinerja pemerintahan untuk mengelolah keuangan Desa (Sobaruddin, 2019).

Tujuan analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau pemerintahan daerah yang berguna bagi para penggunaannya untuk membuat suatu keputusan. Untuk mengetahui posisi laporan keuangan dengan menganalisis rasio keuangan. Rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa sebagai acuan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu pemerintah desa selama satu periode. Rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Desa memiliki fungsi, tujuan, dan maksud yang berbeda. Rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja laporan keuangan daerah yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas dan Rasio Aktivitas.

Berikut diuraikan langkah dalam menilai kinerja laporan keuangan Pemerintah Desa dengan menggunakan Rasio Keuangan. Tulisan ini bertujuan untuk menyediakan khasanah baru dalam menilai kinerja desa.

2. Literature Review

2.1. Analisis Rasio Keuangan

Warsidi dan Bambang dalam Fahmi (2014) menyatakan analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Munawir (2010), analisis rasio keuangan adalah analisis yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan menggunakan alat Analisa berupa rasio yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu organisasi/instansi terutama apabila angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

Sebagai alat analisis untuk mengukur kinerja keuangan, rasio keuangan memiliki keunggulan dan kelemahan dalam penggunaannya. Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam Fahmi (2014), analisis rasio keuangan mempunyai keunggulan sebagai berikut:

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
3. Mengetahui posisi organisasi/instansi ditengah industry lain.

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi.
5. Menstandarisasi size organisasi/instansi.
6. Lebih mudah memperbandingkan organisasi/instansi dengan organisasi/instansi atau melihat perkembangan organisasi/instansi secara periodik atau time series.
7. Lebih mudah melihat tren organisasi/instansi serta melakukan prediksi dimasa yang akan datang.

Selain kelebihan yang ada dari analisis rasio keuangan, J.Fred Weston dalam Kasmir (2013) menyatakan rasio keuangan juga memiliki kelemahan diantaranya :

1. Data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian, data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara.
2. Prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbagai pula, tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut.
3. Adanya manipulasi data dalam Menyusun data, pihak penyusun angka-angka dalam laporan keuangan yang mereka buat sehingga hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya.
4. Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu organisasi/instansi dengan organisasi/instansi lainnya berbeda-beda.
5. Penggunaan tahun fiksial yang berbeda dalam pengaruh musiman mengakibatkan rasio komperatif akan ikut berpengaruh.
6. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industry belum menjamin organisasi/instansi berjalan normal dan dikelola dengan baik.

Fahmi (2014:109) menyatakan bahwa dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis dapat diperoleh manfaat yaitu:

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi organisasi/instansi.
2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu organisasi/instansi dari perspektif keuangan.
4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperikaran potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok jaminan.
5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi.

Menurut Kasmir (2010), yang terdapat empat rasio keuangan yang dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan organisasi/instansi, yaitu:

1. Rasio Likuiditas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan organisasi/instansi dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek.
2. Rasio Solvabilitas atau leverage ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva organisasi/instansi dibiayai dengan utang.
3. Rasio Profitabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan organisasi/instansi untuk mencari keuntungan.
4. Rasio Aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi/instansi dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

2.1.1. Rasio Likuiditas

Menurut Fredweston dalam Kasmir (2013), rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan organisasi/instansi dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila organisasi/instansi ditagih, organisasi/instansi akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Sedangkan menurut Harahap (2010), rasio likuiditas menggambarkan kemampuan organisasi/instansi untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah rasio yang menggambarkan bagaimana kemampuan sebuah organisasi/instansi dalam membayar kewajiban (utang) secara tepat waktu.

Kasmir (2013) mengatakan bahwa rasio likuiditas yang biasa digunakan organisasi/instansi adalah sebagai berikut :

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan organisasi/instansi dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dalam mengukur likuiditas yang penting bukan besar kecilnya perbedaan aktiva lancar dengan hutang lancar melainkan harus dilihat pada hubungannya atau perbandingan yang mencerminkan kemampuan mengembalikan hutang. Rata-rata standar industry untuk *current ratio* adalah 200% atau 2 kali.

Rumus *current Ratio* yang digunakan :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio kas (*Cash Ratio*)

Cash ratio merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. *Cash ratio* yang tinggi menunjukkan kemampuan organisasi/instansi untuk membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan dana kas yang tersedia. Sebaliknya, *cash ratio* yang rendah menunjukkan bahwa organisasi/instansi mengalami kekurangan dana kas untuk membayar hutang jangka

pendeknya sehingga perlu dilakukan penjualan aktiva lancar yang lain untuk menutupi kekurangan dana kas. Rata-rata standar industri untuk *cash ratio* adalah 50%.

Rumus *cash ratio* yang digunakan yaitu :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

3. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar (Utang Jangka Pendek) yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang tersedia dalam perusahaan tanpa memperhitungkan nilai persediaan (Inventory). Rata-rata standar industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali atau 150%.

Rumus quick ratio yang digunakan yaitu :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

4. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turn Over*)

Rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan (utang-utang) dan membiayai biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rata-rata standar industri untuk rasio perputaran kas yaitu 10 kali. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perputaran kas yaitu:

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}} \times 1 \text{ kali}$$

2.1.2. Rasio Solvabilitas

Menurut Bringham dan Houston (2010), rasio solvabilitas (leverage) adalah rasio yang digunakan untuk melihat sampai sejauh apa perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (financial leverage). Menurut Kasmir (2010), rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat besarnya aktiva perusahaan yang dibantu oleh hutang.

Rasio solvabilitas yang umum digunakan menurut Kasmir (2013) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Hutang (*Debt Ratio*)

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rata-rata standar industri untuk debt ratio adalah 35%.

Rumus debt ratio yang digunakan adalah:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. Rasio hutang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rata-rata standar industri untuk *debt to equity ratio* adalah 80%.

Rumus rasio hutang terhadap ekuitas yang digunakan adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

3. *Long-Term Debt to Equity Ratio*

Long-term debt to equity ratio adalah rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rata-rata standar industri untuk *long-term debt to equity ratio* yaitu 10%.

Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Long-Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

4. *Times Interest Earned*

Time interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Rata-rata standar industri untuk *times interest earned* adalah 10 kali.

Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}} \times 100\%$$

2.1.3. Rasio Profitabilitas

Menurut Munawir (2010), rasio profitabilitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Menurut Harahap (2010:304), rasio rentabilitas atau disebut juga profitabilitas menggambarkan

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Sedangkan Sartono (2010) menyatakan profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Kasmir (2013) menyebutkan beberapa jenis rasio Profitabilitas diantaranya:

1. Net Profit Margin

Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Rasio ini merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rata-rata standar industri untuk *net profit margin* yaitu 20%.

Rumus yang digunakan yaitu :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. Gross Profit Margin (GPM)

Gross profit margin adalah margin laba kotor yang menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rata-rata standar industri untuk *gross profit margin* yaitu 30%. Rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin* adalah:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. Return On Investment (ROI)

Rasio ini menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini merupakan suatu ukuran tentang keefektifitasan manajemen dalam mengelola investasinya. Rata-rata standar industri untuk *return on investment* yaitu 30%. Rumus yang digunakan untuk menghitung *return on investment* adalah:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

4. Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return On Equity*)

Return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rata-rata standar industri untuk *return on equity* adalah 40%. Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{REO} = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

5. Laba Per Lembar Saham (*Earning per Share*)

Laba Per Lembar Saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat, dengan pengertian lain bahwa tingkat pengembalian yang tinggi. Rumus yang digunakan untuk menghitung laba per lembar saham yaitu :

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}} \times 100\%$$

2.1.4. Rasio Aktivitas

Merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana akriktivitas penggunaan aset.

1. Umur Piutang (*collection period*)

Merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang pada perusahaan.

$$2. \quad \text{Collection Period} = \frac{360}{\text{Perputaran Piutang}}$$

Merupakan perputaran antara ratio dengan harga pokok penjualan terhadap persediaan rata-rata.

$$3. \quad \text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan Rata-rata}}$$

Merupakan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi penagihan piutang. Rumus yang di pakai yaitu :

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang}}$$

2.2. Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2014), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Sawir (2008), kinerja keuangan merupakan suatu proses atau perangkat proses untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan cara pengambilan keputusan secara rasional dengan menggunakan alat-alat analisis tertentu. Menurut Islahuzzaman (2012), kinerja keuangan adalah perbandingan antara hasil nyata (realisasi) dengan tolak ukur yang

telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Sucipto (2007) mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan sebuah gambaran tentang kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan yang efektif dan efisien.

Menurut Sucipto (2007), penilaian kinerja keuangan dimanfaatkan oleh manajemen untuk hal-hal berikut ini:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Dalam mengelola perusahaan, manajemen menetapkan sasaran yang akan dicapai dimasa yang akan datang dan didalam proses tersebut dinamakan planning.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer dan pemberhentian. Penilaian kinerja akan menghasilkan data yang dapat dipakai secara dasar pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan yang dinilai berdasarkan kinerjanya.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Jika manajemen puncak tidak mengenal kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, sulit bagi manajemen untuk mengevaluasi dan memilih program pelatihan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan.
4. mengenai bagaimana atasan mereka menilai kerja mereka. Dalam organisasi perusahaan, manajemen atas mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada manajemen di bawah mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Hasil pengukuran tersebut juga dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang ditentukan mereka dikatakan berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen dan harus diselidiki letak kesalahannya agar kejadian tersebut tidak terulang.

2.3 Laporan Keuangan Desa

Kesehatan bank dalah kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Wiratna (2015:124) tahap laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, pembiayaan.
3. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi, kemudian berdasarkan transaksi ini dicatat dalam jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca. Neraca berfungsi untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa.
4. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuat laporan realisasi anggaran desa.

Menurut Wiratna (2015:123) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Keuangan desa terdiri atas:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - 1) Hasil usaha Desa
 - 2) Hasil kekayaan Desa
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
 - 4) Lain-lain pendapatan Asli Desa
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah
 - c. Bagian dari Retribusi Daerah
 - d. Alokasi Dana Desa
 - e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga
2. Belanja Desa
 - a. Kelompok Belanja Langsung
 - b. Kelompok Belanja Tidak langsung
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - b. Pengeluaran pembiayaan

3. Hasil, Pembahasan, dan Analisis

Penelitian terdahulu yang menggunakan teknik pengukuran kinerja keuangan desa seperti tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

| No. | Nama Peneliti | Judul penelitian | Metode penelitian | Hasil penelitian |
|-----|---------------|------------------|-------------------|------------------|
|-----|---------------|------------------|-------------------|------------------|

| | | | yang dilakukan | |
|----|---|--|----------------------------|--|
| 1. | Arthaingan H.Mutiha (2016) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014 | Deskriptif kuantitatif | Berdasarkan hasil analisis penelitian ini rata-rata kinerja pengelolaan kota Bogor berdasarkan rasio keuangan adalah baik. Rasio tingkat kemandirian keuangan kota Bogor memiliki hubungan yang konsultatif, di sisi lain, pemerintahan kota Bogor sangat efektif dalam pemerintah kota Bogor masih memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. |
| 2. | Shelly Iszvetya (2007) | Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perum Pegadaian Kantor Pusat Jakarta | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk rasio likuiditas mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir, solvabilitas juga mengalami penurunan, profitabilitas mengalami kenaikan dan cenderung bersifat stabil, secara keseluruhan kinerja perum pegadaian berpredikat sehat. |
| 3. | Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani, dkk (2019) | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBDes (studi kasus Desa Bulok Kecamatan Bendu Kabupaten Magetan) | Deskriptif kuantitatif | Hasil analisis rasio keuangan Desa Bulok tahun 2015-2017 yang dilakukan menunjukkan dari aspek kemandirian masih sangat rendah yaitu sebesar 3,04% (2015), 1,73% (2016), dan 1,45% (2017), sedangkan dari aspek keserasian juga masih kurang baik yaitu belanja rutin sebesar 42% (2015), 38% (2016), dan 43% (2017), untuk belanja modal sebesar 41% (2015), 33% (2016), dan 42% (2017). |
| 4. | Rizki Putri Rachmawati (2013) | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Tegak Kecamatan Sentolo Yogyakarta | Kuantitatif Dan Kualitatif | Berdasarkan current Ratio kriteria tidak baik, berdasarkan quick ratio kriteria tidak baik, berdasarkan cash ratio kriteria tidak baik, berdasarkan Net Worth to debt Ratio kriteria baik, Total Asset to Debt Ratio kriteria baik, Rentabilitas modal sendiri kriteria baik sekali, berdasarkan ROA kriteria baik sekali. Menurut penilaian tingkat kesehatan KPRI Tegak Tahun 2010-2012 dinyatakan kurang sehat. |
| 5. | Rigel Nurul Fathah (2017) | Analisis Rasio Keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul | Deskriptif Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari Rasio Efektifitas PAD tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 131,8%. Rasio Efisiensi Keuangan daerah belum Efisien karena selama lima tahun berturut-turut skalanya di atas 100%. Ratarata rasio Efisiensi keuangan daerah selama lima tahun yaitu 109,8%. Rasio keserasian masih banyak menglokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya, rata-rata rasionya sebesar 71,26%, dibandingkan |

| | | | | |
|----|--------------------------|---|----------------------------|---|
| | | | | dengan rata-rata rasionya Belanja Modal sebesar 9,92%. Rasio pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong interval 0-25%. |
| 6. | Ni Ketut Erna dkk (2017) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012 | Kuantitatif dan Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuangan dengan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat proporsi pada pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk mendapatkan daerah ditempati oleh dana perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 tergolong ekonomis. |
| 7. | Agung Gunawan (2012) | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT Fajar Surya Wisesa, Tbk, Periode tahun 2009, 2010, dan 2011 | Deskriptif Kuantitatif | Jika dinilai dari Likuiditas perusahaan (Rasio Lancar) Likuiditas Kinerja perusahaan kurang baik, berdasarkan rasio perputaran aktiva tetap kinerja keuangan perusahaan cukup baik, berdasarkan rasio utang kondisi kinerja perusahaan kurang baik, berdasarkan rasio pengembalian atas total aktiva kinerja keuangan perusahaan kurang baik |

4. Kesimpulan

Menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola laporan keuangan daerah dengan melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kinerja laporan keuangan pemerintah Desa akan membantu kepala desa dalam mengambil keputusan untuk menggunakan dana APBDes secara baik yang telah disediakan pemerintah pusat. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu mengetahui informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan posisi keuangan suatu pemerintah daerah.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangannya. Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa merupakan

bagian terpenting untuk pengelolaan keuangannya dalam menilai kinerja pemerintahan untuk mengelolah keuangan Desa.

Untuk mengetahui posisi laporan keuangan dengan menganalisis rasio keuangan. Rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa sebagai acuan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu pemerintah desa selama satu periode. Rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Desa memiliki fungsi, tujuan, dan maksud yang berbeda. Rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja laporan keuangan daerah yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas dan Rasio Aktivitas.

Referensi

- Asrinda, Dizzy, S. R, et. al. 2019. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBDes (studi kasus Desa Bulok Kecamatan Bendu Kabupaten Magetan). Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Volume 17.Nomor. 1
- Bastian, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Erlangga.PT. Gelora Aksara Pratama.
- Bre Mamana, K. H. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Periode 2013-2016 (Studi Kasus di Desa Margorejo). Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Ch. E. Sasuwuk, Nathania, et.al, 2016. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Potensi Pendapatan Asli Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Minahasa Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Faradhiba, L., & Diana, N. 2018. Akuntansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Volume 7. Nomor 07.
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK. Volume 8 Nomor 1.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. 2018. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Jurnal Akademi Akuntansi. Volume 1. Nomor 1
- Fuad, 2016. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Bogor. Penerbit: Ghalia Indonesia
- Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga Jakarta. Penerbit: Salemba Empat
- Hoesada Jan. 2019. Akuntansi Desa. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat
- Irmawati, 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Istyanngtias Dian, 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2014.

- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Penerbit: Unit Dan Percetakan 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun., et.al. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Penerbit BPFE-Yogyakarta
- Ratmono, et.al. 2017. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit: UPP STIM YKPN
- Sobaruddin, 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015-2018). Universitas Widya Wiwaha
- Syachbrani, W. (2012). Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-jurnal Ekonomi Bisnis Akuntansi. Volume 4.Nomor 2. 148-152
- Wijaya David, 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta. Penerbit: Gava Media